MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.
2. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah.

Pasal 2

(1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:
   a. pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah yang bersumber dari:
      1. penerimaan dalam negeri; dan/atau
      2. pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, dalam hal pelaksanaan hibah melalui pembiayaan awal (*pre-financing*);
   b. penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan;
   c. pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; dan/atau
   d. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
   b. Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

(3) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
   a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
   b. tahap II, penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi.

(2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
   a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota; dan
   b. tahap II, penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 4

(1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

$KFD_{provinsi\text{-}i}$ = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu]

Keterangan:

$KFD_{provinsi\text{-}i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi.

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pendapatan asli daerah;
   b. pendapatan transfer; dan
   c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(3) Penerimaan pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

(4) Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. dana otonomi khusus; dan
   b. dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(5) Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja bunga; dan
   c. belanja bagi hasil.

(6) Pengeluaran pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah.

Pasal 5

(1) Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

$$RKFD_{provinsi-i} = \frac{KFD_{provinsi-i}}{\text{Belanja Pegawai}_{provinsi-i}}$$

Keterangan:

$RKFD_{provinsi\text{-}i}$ = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi;

$KFD_{provinsi\text{-}i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi; dan

$\text{Belanja Pegawai}_{provinsi\text{-}i}$ = Belanja Pegawai suatu provinsi.

(2) Berdasarkan hasil penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah provinsi dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
RKFD < 1,302	sangat rendah
1,302 ≤ RKFD < 1,799	rendah
1,799 ≤ RKFD< 2,296	sedang
2,296 ≤ RKFD< 2,793	tinggi
2,793 ≤ RKFD	sangat tinggi

jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

(1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

$KFD_{kabupaten/kota-i}$ = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] – [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu]

Keterangan:

$KFD_{kabupaten/kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota.

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pendapatan asli daerah;
   b. pendapatan transfer; dan
   c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(3) Penerimaan pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

(4) Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dana otonomi khusus.

(5) Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja bunga;
   c. belanja bagi hasil; dan
   d. belanja bantuan keuangan kepada desa yang bersumber dari:
      i) dana desa; dan
      ii) alokasi dana desa.

(6) Pengeluaran pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah.

Pasal 7

(1) Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

$$RKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{\text{Belanja Pegawai}_{kabupaten/kota-i}}$$

Keterangan:

$RKFD_{kabupaten/kota-i}$ = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota;

$KFD_{kabupaten/kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota; dan

$\text{Belanja Pegawai}_{kabupaten/kota-i}$ = Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota.

jdih.kemenkeu.go.id

(2) Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
RKFD < 0,947	sangat rendah
0,947 ≤ RKFD < 1,203	rendah
1,203 ≤ RKFD < 1,459	sedang
1,459 ≤ RKFD < 1,715	tinggi
1,715 ≤ RKFD	sangat tinggi

Pasal 8

Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah otonom baru di wilayah Papua yang dibentuk pada tahun 2022 mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah terendah pada daerah otonom induk.

Pasal 9

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan data anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1277), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.kemenkeu.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 691

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

jdih.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

A. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH PROVINSI

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
1	Provinsi Aceh	1,049	Sangat Rendah
2	Provinsi Sumatera Utara	2,238	Sedang
3	Provinsi Sumatera Barat	1,460	Rendah
4	Provinsi Riau	2,567	Tinggi
5	Provinsi Jambi	1,899	Sedang
6	Provinsi Sumatera Selatan	1,832	Sedang
7	Provinsi Bengkulu	1,173	Sangat Rendah
8	Provinsi Lampung	1,726	Rendah
9	Provinsi DKI Jakarta	3,410	Sangat Tinggi
10	Provinsi Jawa Barat	2,456	Tinggi
11	Provinsi Jawa Tengah	1,821	Sedang
12	Provinsi DI Yogyakarta	1,418	Rendah
13	Provinsi Jawa Timur	1,865	Sedang
14	Provinsi Kalimantan Barat	2,058	Sedang
15	Provinsi Kalimantan Tengah	2,791	Tinggi
16	Provinsi Kalimantan Selatan	1,903	Sedang
17	Provinsi Kalimantan Timur	3,652	Sangat Tinggi
18	Provinsi Sulawesi Utara	1,172	Sangat Rendah
19	Provinsi Sulawesi Tengah	1,360	Rendah
20	Provinsi Sulawesi Selatan	1,545	Rendah

jdih.kemenkeu.go.id

21	Provinsi Sulawesi Tenggara	1,517	Rendah
22	Provinsi Bali	2,179	Sedang
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1,375	Rendah
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,505	Rendah
25	Provinsi Maluku	1,498	Rendah
26	Provinsi Papua	1,935	Sedang
27	Provinsi Maluku Utara	2,742	Tinggi
28	Provinsi Banten	2,819	Sangat Tinggi
29	Provinsi Bangka Belitung	1,755	Rendah
30	Provinsi Gorontalo	1,421	Rendah
31	Provinsi Kepulauan Riau	1,592	Rendah
32	Provinsi Papua Barat	3,877	Sangat Tinggi
33	Provinsi Sulawesi Barat	1,784	Rendah
34	Provinsi Kalimantan Utara	2,347	Tinggi
35	Provinsi Papua Selatan	1,935	Sedang
36	Provinsi Papua Tengah	1,935	Sedang
37	Provinsi Papua Pegunungan	1,935	Sedang
38	Provinsi Papua Barat Daya	1,935	Sedang

jdih.kemenkeu.go.id

B. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
1	Kab. Aceh Barat	0,872	Sangat Rendah
2	Kab. Aceh Besar	1,026	Rendah
3	Kab. Aceh Selatan	1,430	Sedang
4	Kab. Aceh Singkil	0,982	Rendah
5	Kab. Aceh Tengah	0,785	Sangat Rendah
6	Kab. Aceh Tenggara	1,136	Rendah
7	Kab. Aceh Timur	0,674	Sangat Rendah
8	Kab. Aceh Utara	0,946	Sangat Rendah
9	Kab. Bireuen	0,786	Sangat Rendah
10	Kab. Pidie	0,779	Sangat Rendah
11	Kab. Simeulue	1,065	Rendah
12	Kota Banda Aceh	1,318	Sedang
13	Kota Sabang	1,012	Rendah
14	Kota Langsa	1,254	Sedang
15	Kota Lhokseumawe	0,950	Rendah
16	Kab. Gayo Lues	1,336	Sedang
17	Kab. Aceh Barat Daya	1,427	Sedang
18	Kab. Aceh Jaya	1,057	Rendah
19	Kab. Nagan Raya	1,074	Rendah
20	Kab. Aceh Tamiang	1,008	Rendah
21	Kab. Bener Meriah	0,958	Rendah
22	Kab. Pidie Jaya	1,365	Sedang
23	Kota Subulussalam	1,746	Sangat Tinggi
24	Kab. Asahan	1,122	Rendah
25	Kab. Dairi	1,133	Rendah
26	Kab. Deli Serdang	1,373	Sedang

jdih.kemenkeu.go.id

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
27	Kab. Karo	0,788	Sangat Rendah
28	Kab. Labuhanbatu	1,118	Rendah
29	Kab. Langkat	0,625	Sangat Rendah
30	Kab. Mandailing Natal	0,827	Sangat Rendah
31	Kab. Nias	1,380	Sedang
32	Kab. Simalungun	1,097	Rendah
33	Kab. Tapanuli Selatan	1,911	Sangat Tinggi
34	Kab. Tapanuli Tengah	1,016	Rendah
35	Kab. Tapanuli Utara	0,868	Sangat Rendah
36	Kab. Toba	1,003	Rendah
37	Kota Binjai	0,845	Sangat Rendah
38	Kota Medan	2,750	Sangat Tinggi
39	Kota Pematang Siantar	0,957	Rendah
40	Kota Sibolga	1,300	Sedang
41	Kota Tanjung Balai	1,073	Rendah
42	Kota Tebing Tinggi	1,366	Sedang
43	Kota Padang Sidempuan	1,149	Rendah
44	Kab. Pakpak Bharat	1,398	Sedang
45	Kab. Nias Selatan	1,488	Tinggi
46	Kab. Humbang Hasundutan	1,254	Sedang
47	Kab. Serdang Bedagai	1,167	Rendah
48	Kab. Samosir	1,245	Sedang
49	Kab. Batu Bara	1,495	Tinggi
50	Kab. Padang Lawas	1,172	Rendah
51	Kab. Padang Lawas Utara	0,964	Rendah
52	Kab. Labuhanbatu Selatan	1,272	Sedang
53	Kab. Labuhanbatu Utara	1,195	Rendah

jdih.kemenkeu.go.id

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
54	Kab. Nias Utara	1,646	Tinggi
55	Kab. Nias Barat	1,332	Sedang
56	Kota Gunungsitoli	1,282	Sedang
57	Kab. Limapuluh Kota	0,596	Sangat Rendah
58	Kab. Agam	0,958	Rendah
59	Kab. Kepulauan Mentawai	1,730	Sangat Tinggi
60	Kab. Padang Pariaman	0,750	Sangat Rendah
61	Kab. Pasaman	1,124	Rendah
62	Kab. Pesisir Selatan	0,803	Sangat Rendah
63	Kab. Sijunjung	1,014	Rendah
64	Kab. Solok	0,813	Sangat Rendah
65	Kab. Tanah Datar	0,965	Rendah
66	Kota Bukittinggi	1,533	Tinggi
67	Kota Padang Panjang	1,087	Rendah
68	Kota Padang	1,199	Rendah
69	Kota Payakumbuh	0,998	Rendah
70	Kota Sawahlunto	1,211	Sedang
71	Kota Solok	1,199	Rendah
72	Kota Pariaman	1,103	Rendah
73	Kab. Pasaman Barat	0,961	Rendah
74	Kab. Dharmasraya	0,966	Rendah
75	Kab. Solok Selatan	1,037	Rendah
76	Kab. Bengkalis	2,122	Sangat Tinggi
77	Kab. Indragiri Hilir	1,354	Sedang
78	Kab. Indragiri Hulu	1,278	Sedang
79	Kab. Kampar	0,846	Sangat Rendah
80	Kab. Kuantan Singingi	1,201	Rendah

jdih.kemenkeu.go.id

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
81	Kab. Pelalawan	2,131	Sangat Tinggi
82	Kab. Rokan Hilir	1,362	Sedang
83	Kab. Rokan Hulu	1,108	Rendah
84	Kab. Siak	1,306	Sedang
85	Kota Dumai	1,659	Tinggi
86	Kota Pekanbaru	1,845	Sangat Tinggi
87	Kab. Kepulauan Meranti	1,570	Tinggi
88	Kab. Batang Hari	1,523	Tinggi
89	Kab. Bungo	1,133	Rendah
90	Kab. Kerinci	1,098	Rendah
91	Kab. Merangin	1,030	Rendah
92	Kab. Muaro Jambi	1,142	Rendah
93	Kab. Sarolangun	1,254	Sedang
94	Kab. Tanjung Jabung Barat	1,390	Sedang
95	Kab. Tanjung Jabung Timur	1,426	Sedang
96	Kab. Tebo	1,303	Sedang
97	Kota Jambi	1,514	Tinggi
98	Kota Sungai Penuh	1,049	Rendah
99	Kab. Lahat	1,682	Tinggi
100	Kab. Musi Banyuasin	1,877	Sangat Tinggi
101	Kab. Musi Rawas	1,555	Tinggi
102	Kab. Muara Enim	1,161	Rendah
103	Kab. Ogan Komering Ilir	1,153	Rendah
104	Kab. Ogan Komering Ulu	1,401	Sedang
105	Kota Palembang	1,459	Tinggi
106	Kota Prabumulih	1,155	Rendah
107	Kota Pagar Alam	1,488	Tinggi

jdih.kemenkeu.go.id

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
108	Kota Lubuk Linggau	0,977	Rendah
109	Kab. Banyuasin	1,264	Sedang
110	Kab. Ogan Ilir	1,118	Rendah
111	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1,023	Rendah
112	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1,138	Rendah
113	Kab. Empat Lawang	1,515	Tinggi
114	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2,390	Sangat Tinggi
115	Kab. Musi Rawas Utara	2,330	Sangat Tinggi
116	Kab. Bengkulu Selatan	0,789	Sangat Rendah
117	Kab. Bengkulu Utara	1,126	Rendah
118	Kab. Rejang Lebong	0,921	Sangat Rendah
119	Kota Bengkulu	1,059	Rendah
120	Kab. Kaur	1,249	Sedang
121	Kab. Seluma	1,050	Rendah
122	Kab. Mukomuko	1,088	Rendah
123	Kab. Lebong	1,199	Rendah
124	Kab. Kepahiang	0,801	Sangat Rendah
125	Kab. Bengkulu Tengah	0,970	Rendah
126	Kab. Lampung Barat	0,849	Sangat Rendah
127	Kab. Lampung Selatan	1,020	Rendah
128	Kab. Lampung Tengah	0,791	Sangat Rendah
129	Kab. Lampung Utara	0,713	Sangat Rendah
130	Kab. Lampung Timur	1,051	Rendah
131	Kab. Tanggamus	1,121	Rendah
132	Kab. Tulang Bawang	1,245	Sedang
133	Kab. Way Kanan	0,958	Rendah

jdih.kemenkeu.go.id

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
134	Kota Bandar Lampung	1,266	Sedang
135	Kota Metro	1,344	Sedang
136	Kab. Pesawaran	1,102	Rendah
137	Kab. Pringsewu	0,851	Sangat Rendah
138	Kab. Mesuji	1,404	Sedang
139	Kab. Tulang Bawang Barat	0,931	Sangat Rendah
140	Kab. Pesisir Barat	1,286	Sedang
141	Kab. Bandung	1,777	Sangat Tinggi
142	Kab. Bekasi	1,662	Tinggi
143	Kab. Bogor	2,110	Sangat Tinggi
144	Kab. Ciamis	0,740	Sangat Rendah
145	Kab. Cianjur	1,440	Sedang
146	Kab. Cirebon	1,006	Rendah
147	Kab. Garut	1,245	Sedang
148	Kab. Indramayu	1,003	Rendah
149	Kab. Karawang	1,414	Sedang
150	Kab. Kuningan	1,063	Rendah
151	Kab. Majalengka	1,159	Rendah
152	Kab. Purwakarta	1,311	Sedang
153	Kab. Subang	0,985	Rendah
154	Kab. Sukabumi	1,582	Tinggi
155	Kab. Sumedang	0,914	Sangat Rendah
156	Kab. Tasikmalaya	0,999	Rendah
157	Kota Bandung	1,489	Tinggi
158	Kota Bekasi	1,658	Tinggi
159	Kota Bogor	1,817	Sangat Tinggi
160	Kota Cirebon	1,400	Sedang

jdih.kemenkeu.go.id

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
161	Kota Depok	2,481	Sangat Tinggi
162	Kota Sukabumi	1,075	Rendah
163	Kota Tasikmalaya	0,975	Rendah
164	Kota Cimahi	1,200	Rendah
165	Kota Banjar	0,953	Rendah
166	Kab. Bandung Barat	1,182	Rendah
167	Kab. Pangandaran	2,010	Sangat Tinggi
168	Kab. Banjarnegara	1,198	Rendah
169	Kab. Banyumas	0,986	Rendah
170	Kab. Batang	1,122	Rendah
171	Kab. Blora	1,107	Rendah
172	Kab. Boyolali	1,082	Rendah
173	Kab. Brebes	1,282	Sedang
174	Kab. Cilacap	1,192	Rendah
175	Kab. Demak	1,140	Rendah
176	Kab. Grobogan	1,053	Rendah
177	Kab. Jepara	1,194	Rendah
178	Kab. Karanganyar	0,927	Sangat Rendah
179	Kab. Kebumen	0,998	Rendah
180	Kab. Kendal	1,229	Sedang
181	Kab. Klaten	0,925	Sangat Rendah
182	Kab. Kudus	1,194	Rendah
183	Kab. Magelang	1,045	Rendah
184	Kab. Pati	1,016	Rendah
185	Kab. Pekalongan	0,927	Sangat Rendah
186	Kab. Pemalang	0,873	Sangat Rendah
187	Kab. Purbalingga	0,804	Sangat Rendah

jdih.kemenkeu.go.id

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
188	Kab. Purworejo	1,152	Rendah
189	Kab. Rembang	1,215	Sedang
190	Kab. Semarang	1,142	Rendah
191	Kab. Sragen	0,945	Sangat Rendah
192	Kab. Sukoharjo	1,231	Sedang
193	Kab. Tegal	1,183	Rendah
194	Kab. Temanggung	1,147	Rendah
195	Kab. Wonogiri	0,674	Sangat Rendah
196	Kab. Wonosobo	1,145	Rendah
197	Kota Magelang	1,798	Sangat Tinggi
198	Kota Pekalongan	1,540	Tinggi
199	Kota Salatiga	1,424	Sedang
200	Kota Semarang	2,450	Sangat Tinggi
201	Kota Surakarta	2,012	Sangat Tinggi
202	Kota Tegal	1,498	Tinggi
203	Kab. Bantul	1,378	Sedang
204	Kab. Gunung Kidul	1,137	Rendah
205	Kab. Kulon Progo	1,174	Rendah
206	Kab. Sleman	1,676	Tinggi
207	Kota Yogyakarta	1,603	Tinggi
208	Kab. Bangkalan	0,994	Rendah
209	Kab. Banyuwangi	2,941	Sangat Tinggi
210	Kab. Blitar	1,386	Sedang
211	Kab. Bojonegoro	3,532	Sangat Tinggi
212	Kab. Bondowoso	1,031	Rendah
213	Kab. Gresik	2,293	Sangat Tinggi
214	Kab. Jember	1,533	Tinggi

jdih.kemenkeu.go.id

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
215	Kab. Jombang	1,291	Sedang
216	Kab. Kediri	1,610	Tinggi
217	Kab. Lamongan	1,757	Sangat Tinggi
218	Kab. Lumajang	1,496	Tinggi
219	Kab. Madiun	1,378	Sedang
220	Kab. Magetan	1,229	Sedang
221	Kab. Malang	1,578	Tinggi
222	Kab. Mojokerto	1,322	Sedang
223	Kab. Nganjuk	1,010	Rendah
224	Kab. Ngawi	1,114	Rendah
225	Kab. Pacitan	0,856	Sangat Rendah
226	Kab. Pamekasan	1,295	Sedang
227	Kab. Pasuruan	1,533	Tinggi
228	Kab. Ponorogo	1,235	Sedang
229	Kab. Probolinggo	0,978	Rendah
230	Kab. Sampang	1,232	Sedang
231	Kab. Sidoarjo	1,798	Sangat Tinggi
232	Kab. Situbondo	1,323	Sedang
233	Kab. Sumenep	1,100	Rendah
234	Kab. Trenggalek	0,986	Rendah
235	Kab. Tuban	1,413	Sedang
236	Kab. Tulungagung	0,887	Sangat Rendah
237	Kota Blitar	2,164	Sangat Tinggi
238	Kota Kediri	1,641	Tinggi
239	Kota Madiun	1,576	Tinggi
240	Kota Malang	1,677	Tinggi
241	Kota Mojokerto	2,214	Sangat Tinggi

jdih.kemenkeu.go.id

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
242	Kota Pasuruan	1,703	Tinggi
243	Kota Probolinggo	1,275	Sedang
244	Kota Surabaya	3,078	Sangat Tinggi
245	Kota Batu	1,546	Tinggi
246	Kab. Bengkayang	1,409	Sedang
247	Kab. Landak	1,296	Sedang
248	Kab. Kapuas Hulu	1,377	Sedang
249	Kab. Ketapang	1,169	Rendah
250	Kab. Mempawah	1,030	Rendah
251	Kab. Sambas	0,980	Rendah
252	Kab. Sanggau	1,529	Tinggi
253	Kab. Sintang	0,933	Sangat Rendah
254	Kota Pontianak	1,799	Sangat Tinggi
255	Kota Singkawang	1,195	Rendah
256	Kab. Sekadau	1,270	Sedang
257	Kab. Melawi	1,154	Rendah
258	Kab. Kayong Utara	1,218	Sedang
259	Kab. Kubu Raya	1,343	Sedang
260	Kab. Barito Selatan	1,399	Sedang
261	Kab. Barito Utara	2,004	Sangat Tinggi
262	Kab. Kapuas	2,027	Sangat Tinggi
263	Kab. Kotawaringin Barat	1,421	Sedang
264	Kab. Kotawaringin Timur	1,366	Sedang
265	Kota Palangka Raya	1,190	Rendah
266	Kab. Katingan	1,632	Tinggi
267	Kab. Seruyan	1,779	Sangat Tinggi
268	Kab. Sukamara	1,547	Tinggi

jdih.kemenkeu.go.id

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
269	Kab. Lamandau	1,499	Tinggi
270	Kab. Gunung Mas	1,266	Sedang
271	Kab. Pulang Pisau	1,716	Sangat Tinggi
272	Kab. Murung Raya	2,222	Sangat Tinggi
273	Kab. Barito Timur	1,589	Tinggi
274	Kab. Banjar	1,160	Rendah
275	Kab. Barito Kuala	0,919	Sangat Rendah
276	Kab. Hulu Sungai Selatan	1,626	Tinggi
277	Kab. Hulu Sungai Tengah	1,642	Tinggi
278	Kab. Hulu Sungai Utara	1,470	Tinggi
279	Kab. Kotabaru	1,972	Sangat Tinggi
280	Kab. Tabalong	1,673	Tinggi
281	Kab. Tanah Laut	1,920	Sangat Tinggi
282	Kab. Tapin	2,209	Sangat Tinggi
283	Kota Banjarbaru	1,621	Tinggi
284	Kota Banjarmasin	2,020	Sangat Tinggi
285	Kab. Balangan	2,611	Sangat Tinggi
286	Kab. Tanah Bumbu	3,527	Sangat Tinggi
287	Kab. Berau	3,293	Sangat Tinggi
288	Kab. Kutai Kartanegara	2,757	Sangat Tinggi
289	Kab. Kutai Barat	1,650	Tinggi
290	Kab. Kutai Timur	2,725	Sangat Tinggi
291	Kab. Paser	2,920	Sangat Tinggi
292	Kota Balikpapan	2,414	Sangat Tinggi
293	Kota Bontang	1,853	Sangat Tinggi
294	Kota Samarinda	2,584	Sangat Tinggi
295	Kab. Penajam Paser Utara	1,603	Tinggi

jdih.kemenkeu.go.id

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
296	Kab. Mahakam Ulu	5,939	Sangat Tinggi
297	Kab. Bolaang Mongondow	0,984	Rendah
298	Kab. Minahasa	0,800	Sangat Rendah
299	Kab. Kepulauan Sangihe	0,913	Sangat Rendah
300	Kota Bitung	1,622	Tinggi
301	Kota Manado	1,693	Tinggi
302	Kab. Kepulauan Talaud	1,104	Rendah
303	Kab. Minahasa Selatan	0,878	Sangat Rendah
304	Kota Tomohon	1,198	Rendah
305	Kab. Minahasa Utara	1,378	Sedang
306	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1,061	Rendah
307	Kota Kotamobagu	1,365	Sedang
308	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1,130	Rendah
309	Kab. Minahasa Tenggara	1,064	Rendah
310	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1,121	Rendah
311	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1,397	Sedang
312	Kab. Banggai	1,165	Rendah
313	Kab. Banggai Kepulauan	0,873	Sangat Rendah
314	Kab. Buol	0,772	Sangat Rendah
315	Kab. Toli-Toli	1,095	Rendah
316	Kab. Donggala	0,587	Sangat Rendah
317	Kab. Morowali	2,658	Sangat Tinggi
318	Kab. Poso	0,737	Sangat Rendah
319	Kota Palu	1,566	Tinggi
320	Kab. Parigi Moutong	1,277	Sedang

jdih.kemenkeu.go.id

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
321	Kab. Tojo Una-Una	1,316	Sedang
322	Kab. Sigi	0,958	Rendah
323	Kab. Banggai Laut	1,105	Rendah
324	Kab. Morowali Utara	1,380	Sedang
325	Kab. Bantaeng	1,210	Sedang
326	Kab. Barru	0,918	Sangat Rendah
327	Kab. Bone	0,945	Sangat Rendah
328	Kab. Bulukumba	1,023	Rendah
329	Kab. Enrekang	1,144	Rendah
330	Kab. Gowa	1,055	Rendah
331	Kab. Jeneponto	1,222	Sedang
332	Kab. Luwu	1,074	Rendah
333	Kab. Luwu Utara	1,105	Rendah
334	Kab. Maros	1,189	Rendah
335	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1,081	Rendah
336	Kota Palopo	1,284	Sedang
337	Kab. Luwu Timur	1,676	Tinggi
338	Kab. Pinrang	0,935	Sangat Rendah
339	Kab. Sinjai	0,978	Rendah
340	Kab. Kepulauan Selayar	1,481	Tinggi
341	Kab. Sidenreng Rappang	1,030	Rendah
342	Kab. Soppeng	0,840	Sangat Rendah
343	Kab. Takalar	0,756	Sangat Rendah
344	Kab. Tana Toraja	0,946	Sangat Rendah
345	Kab. Wajo	0,871	Sangat Rendah
346	Kota Parepare	1,586	Tinggi

jdih.kemenkeu.go.id

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
347	Kota Makassar	2,846	Sangat Tinggi
348	Kab. Toraja Utara	1,450	Sedang
349	Kab. Buton	0,945	Sangat Rendah
350	Kab. Konawe	1,033	Rendah
351	Kab. Kolaka	2,177	Sangat Tinggi
352	Kab. Muna	1,007	Rendah
353	Kota Kendari	1,188	Rendah
354	Kota Bau-bau	1,125	Rendah
355	Kab. Konawe Selatan	1,334	Sedang
356	Kab. Bombana	1,685	Tinggi
357	Kab. Wakatobi	1,604	Tinggi
358	Kab. Kolaka Utara	1,321	Sedang
359	Kab. Konawe Utara	2,036	Sangat Tinggi
360	Kab. Buton Utara	1,728	Sangat Tinggi
361	Kab. Konawe Kepulauan	2,199	Sangat Tinggi
362	Kab. Kolaka Timur	1,635	Tinggi
363	Kab. Muna Barat	1,298	Sedang
364	Kab. Buton Tengah	1,854	Sangat Tinggi
365	Kab. Buton Selatan	1,498	Tinggi
366	Kab. Badung	1,897	Sangat Tinggi
367	Kab. Bangli	1,240	Sedang
368	Kab. Buleleng	1,036	Rendah
369	Kab. Gianyar	2,007	Sangat Tinggi
370	Kab. Jembrana	1,239	Sedang
371	Kab. Karangasem	1,160	Rendah
372	Kab. Klungkung	1,418	Sedang
373	Kab. Tabanan	1,135	Rendah

jdih.kemenkeu.go.id

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
374	Kota Denpasar	1,432	Sedang
375	Kab. Bima	0,929	Sangat Rendah
376	Kab. Dompu	1,273	Sedang
377	Kab. Lombok Barat	0,953	Rendah
378	Kab. Lombok Tengah	0,763	Sangat Rendah
379	Kab. Lombok Timur	1,264	Sedang
380	Kab. Sumbawa	1,082	Rendah
381	Kota Mataram	1,547	Tinggi
382	Kota Bima	1,230	Sedang
383	Kab. Sumbawa Barat	2,362	Sangat Tinggi
384	Kab. Lombok Utara	1,444	Sedang
385	Kab. Alor	1,348	Sedang
386	Kab. Belu	1,139	Rendah
387	Kab. Ende	0,827	Sangat Rendah
388	Kab. Flores Timur	0,864	Sangat Rendah
389	Kab. Kupang	1,261	Sedang
390	Kab. Lembata	0,884	Sangat Rendah
391	Kab. Manggarai	1,254	Sedang
392	Kab. Ngada	0,981	Rendah
393	Kab. Sikka	1,047	Rendah
394	Kab. Sumba Barat	2,216	Sangat Tinggi
395	Kab. Sumba Timur	1,274	Sedang
396	Kab. Timor Tengah Selatan	0,860	Sangat Rendah
397	Kab. Timor Tengah Utara	0,913	Sangat Rendah
398	Kota Kupang	1,049	Rendah
399	Kab. Rote Ndao	1,225	Sedang
400	Kab. Manggarai Barat	1,826	Sangat Tinggi

jdih.kemenkeu.go.id

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
401	Kab. Nagekeo	1,013	Rendah
402	Kab. Sumba Barat Daya	1,685	Tinggi
403	Kab. Sumba Tengah	1,622	Tinggi
404	Kab. Manggarai Timur	1,382	Sedang
405	Kab. Sabu Raijua	1,535	Tinggi
406	Kab. Malaka	1,571	Tinggi
407	Kab. Kepulauan Tanimbar	1,176	Rendah
408	Kab. Maluku Tengah	0,983	Rendah
409	Kab. Maluku Tenggara	1,841	Sangat Tinggi
410	Kab. Buru	0,831	Sangat Rendah
411	Kota Ambon	1,032	Rendah
412	Kab. Seram Bagian Barat	0,996	Rendah
413	Kab. Seram Bagian Timur	1,391	Sedang
414	Kab. Kepulauan Aru	1,727	Sangat Tinggi
415	Kota Tual	1,292	Sedang
416	Kab. Maluku Barat Daya	1,863	Sangat Tinggi
417	Kab. Buru Selatan	1,588	Tinggi
418	Kab. Biak Numfor	1,253	Sedang
419	Kab. Jayapura	1,485	Tinggi
420	Kab. Kepulauan Yapen	1,356	Sedang
421	Kota Jayapura	1,049	Rendah
422	Kab. Sarmi	2,519	Sangat Tinggi
423	Kab. Keerom	1,285	Sedang
424	Kab. Waropen	2,546	Sangat Tinggi
425	Kab. Supiori	1,411	Sedang
426	Kab. Mamberamo Raya	3,772	Sangat Tinggi
427	Kab. Halmahera Tengah	3,982	Sangat Tinggi

jdih.kemenkeu.go.id

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
428	Kota Ternate	1,159	Rendah
429	Kab. Halmahera Barat	1,150	Rendah
430	Kab. Halmahera Timur	2,264	Sangat Tinggi
431	Kab. Halmahera Selatan	1,992	Sangat Tinggi
432	Kab. Halmahera Utara	2,483	Sangat Tinggi
433	Kab. Kepulauan Sula	1,781	Sangat Tinggi
434	Kota Tidore Kepulauan	1,692	Tinggi
435	Kab. Pulau Morotai	2,144	Sangat Tinggi
436	Kab. Pulau Taliabu	3,882	Sangat Tinggi
437	Kab. Lebak	1,036	Rendah
438	Kab. Pandeglang	0,690	Sangat Rendah
439	Kab. Serang	0,908	Sangat Rendah
440	Kab. Tangerang	1,785	Sangat Tinggi
441	Kota Cilegon	1,543	Tinggi
442	Kota Tangerang	1,847	Sangat Tinggi
443	Kota Serang	1,303	Sedang
444	Kota Tangerang Selatan	2,781	Sangat Tinggi
445	Kab. Bangka	1,562	Tinggi
446	Kab. Belitung	1,122	Rendah
447	Kota Pangkal Pinang	1,252	Sedang
448	Kab. Bangka Selatan	1,835	Sangat Tinggi
449	Kab. Bangka Tengah	1,076	Rendah
450	Kab. Bangka Barat	1,420	Sedang
451	Kab. Belitung Timur	1,188	Rendah
452	Kab. Boalemo	0,903	Sangat Rendah
453	Kab. Gorontalo	0,850	Sangat Rendah
454	Kota Gorontalo	1,314	Sedang

jdih.kemenkeu.go.id

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
455	Kab. Pohuwato	1,174	Rendah
456	Kab. Bone Bolango	0,866	Sangat Rendah
457	Kab. Gorontalo Utara	1,360	Sedang
458	Kab. Natuna	1,659	Tinggi
459	Kab. Kepulauan Anambas	1,263	Sedang
460	Kab. Karimun	1,699	Tinggi
461	Kota Batam	1,675	Tinggi
462	Kota Tanjung Pinang	1,069	Rendah
463	Kab. Lingga	1,353	Sedang
464	Kab. Bintan	0,957	Rendah
465	Kab. Fakfak	1,297	Sedang
466	Kab. Manokwari	0,719	Sangat Rendah
467	Kab. Teluk Bintuni	4,393	Sangat Tinggi
468	Kab. Teluk Wondama	2,123	Sangat Tinggi
469	Kab. Kaimana	1,817	Sangat Tinggi
470	Kab. Manokwari Selatan	1,450	Sedang
471	Kab. Pegunungan Arfak	2,266	Sangat Tinggi
472	Kab. Majene	0,846	Sangat Rendah
473	Kab. Mamuju	1,236	Sedang
474	Kab. Polewali Mandar	1,241	Sedang
475	Kab. Mamasa	0,891	Sangat Rendah
476	Kab. Pasangkayu	1,341	Sedang
477	Kab. Mamuju Tengah	1,722	Sangat Tinggi
478	Kab. Bulungan	1,809	Sangat Tinggi
479	Kab. Malinau	2,064	Sangat Tinggi

jdih.kemenkeu.go.id

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
480	Kab. Nunukan	1,624	Tinggi
481	Kota Tarakan	1,610	Tinggi
482	Kab. Tana Tidung	2,043	Sangat Tinggi
483	Kab. Merauke	1,610	Tinggi
484	Kab. Boven Digoel	2,317	Sangat Tinggi
485	Kab. Mappi	1,859	Sangat Tinggi
486	Kab. Asmat	1,760	Sangat Tinggi
487	Kab. Mimika	3,781	Sangat Tinggi
488	Kab. Nabire	1,170	Rendah
489	Kab. Paniai	1,853	Sangat Tinggi
490	Kab. Puncak Jaya	2,147	Sangat Tinggi
491	Kab. Dogiyai	1,841	Sangat Tinggi
492	Kab. Puncak	2,116	Sangat Tinggi
493	Kab. Intan Jaya	2,091	Sangat Tinggi
494	Kab. Deiyai	1,834	Sangat Tinggi
495	Kab. Jayawijaya	1,893	Sangat Tinggi
496	Kab. Yahukimo	2,072	Sangat Tinggi
497	Kab. Pegunungan Bintang	1,864	Sangat Tinggi
498	Kab. Tolikara	2,380	Sangat Tinggi
499	Kab. Mamberamo Tengah	2,304	Sangat Tinggi
500	Kab. Yalimo	2,223	Sangat Tinggi
501	Kab. Lanny Jaya	2,015	Sangat Tinggi
502	Kab. Nduga	3,503	Sangat Tinggi
503	Kab. Sorong	1,415	Sedang
504	Kota Sorong	0,944	Sangat Rendah
505	Kab. Raja Ampat	2,150	Sangat Tinggi
506	Kab. Sorong Selatan	1,650	Tinggi

jdih.kemenkeu.go.id

NO	NAMA DAERAH	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
507	Kab. Maybrat	1,749	Sangat Tinggi
508	Kab. Tambrauw	2,423	Sangat Tinggi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

jdih.kemenkeu.go.id